

Pesantren dan Kebijakan Sekolah Terintegrasi Berbasis Masyarakat: Analisis Paradigma Sosiologi Terpadu George Ritzer di SMK Nurul Huda

Imam Muhidin¹, Himiyatul Linggar²

^{1,2} Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Al Qolam Malang, Malang,
Indonesia

Email: imammuhidinabduh1986@gmail.com¹, himiyatullinggar25@pasca.alqolam.ac.id²

Abstract

This study aims to examine the integrated Islamic boarding school-based education system at SMK Nurul Huda using George Ritzer's Integrated Sociological Paradigm perspective. The approach used in this study is qualitative with a case study design to gain an in-depth understanding of the integration between formal education and Islamic boarding school education in a community-based education system. The research informants consisted of the principal, Islamic boarding school caretakers, teachers, ustadz, and students selected through purposive sampling techniques. The data collection process was carried out through in-depth interviews, field observations, and documentation, while data analysis used the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña through the stages of data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The research findings indicate that educational integration at SMK Nurul Huda is not only evident in the unification of the curriculum and institutional system, but also in the formation of educational culture, social relationship patterns, and student awareness in everyday life. The Islamic boarding school culture has a dominant influence in shaping educational policies, discipline, religiosity, and student identity as both students and formal school students. Although implementing an integrated education system presents challenges in the form of dense student activities and limited rest time, the system is considered capable of creating a balance between academic competence, work skills, and moral development for students. Thus, Islamic boarding school-based education demonstrates its relevance as a holistic educational model in the development of contemporary Islamic education oriented toward strengthening character and religious values.

Keywords: *integrated education, Islamic boarding school, Integrated Sociological Paradigm*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji sistem pendidikan terintegrasi berbasis pesantren di SMK Nurul Huda dengan menggunakan perspektif Paradigma Sosiologi Terpadu George Ritzer. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan desain studi kasus guna memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai integrasi antara pendidikan formal dan pendidikan kepesantrenan dalam satu sistem pendidikan berbasis masyarakat. Informan penelitian terdiri atas kepala sekolah, pengasuh pesantren, guru, ustadz, dan siswa yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa integrasi pendidikan di SMK Nurul Huda tidak hanya tampak pada penyatuan kurikulum dan sistem kelembagaan, tetapi juga pada pembentukan budaya pendidikan, pola hubungan sosial, serta kesadaran siswa dalam kehidupan sehari-hari. Kultur pesantren memiliki pengaruh dominan dalam membentuk kebijakan pendidikan, kedisiplinan, religiusitas, dan identitas siswa sebagai santri sekaligus pelajar sekolah formal. Meskipun pelaksanaan sistem pendidikan terintegrasi menghadirkan tantangan berupa padatnnya aktivitas siswa dan terbatasnya waktu istirahat, sistem tersebut dinilai mampu membentuk keseimbangan antara kompetensi akademik, keterampilan kerja, dan pembinaan moral peserta didik. Dengan demikian, pendidikan berbasis pesantren menunjukkan relevansi sebagai model pendidikan holistik dalam pengembangan pendidikan Islam kontemporer yang berorientasi pada penguatan karakter dan nilai religius

Kata Kunci: Pendidikan terintegrasi, pesantren, Paradigma Sosiologi Terpadu

A. PENDAHULUAN

Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya kecenderungan menuju penguatan model pendidikan terpadu antara pesantren dan sekolah formal (Ochocka, 2025). Fenomena tersebut lahir sebagai respons atas kebutuhan masyarakat yang tidak hanya menginginkan kemampuan akademik dan

keterampilan kerja, tetapi juga pembentukan karakter religius yang kuat pada peserta didik (Wardatul Hamrok, 2022). Dalam konteks ini, pesantren tidak lagi dipahami hanya sebagai lembaga pendidikan tradisional berbasis keagamaan, melainkan berkembang menjadi pusat pembentukan nilai dan budaya pendidikan yang mampu beradaptasi dengan tuntutan modernitas (Halil, 2003). Kehadiran sekolah formal berbasis pesantren menjadi salah satu bentuk transformasi pendidikan masyarakat yang berupaya memadukan penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan vokasional, dan pembinaan moral keagamaan dalam satu sistem pendidikan yang terpadu (Imam Syafi'i, 2025). Konsep penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa integrasi antara pesantren dan sekolah formal merupakan suatu sistem pendidikan yang menghubungkan struktur pendidikan nasional dengan kultur kepesantrenan (Kairin, 2025). Istilah "pesantren dan kebijakan sekolah terintegrasi berbasis masyarakat" dalam penelitian ini dimaknai sebagai pola penyelenggaraan pendidikan yang menjadikan pesantren sebagai fondasi utama dalam pembentukan kebijakan, budaya, dan orientasi pendidikan sekolah formal (Ochocka, 2025). Integrasi tersebut tidak hanya tampak pada penyatuan kurikulum, tetapi juga terlihat dalam pengaturan disiplin, pembinaan karakter, pola interaksi sosial, hingga budaya kelembagaan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Aviah Asmaul Husna, 2025). Kehadiran sekolah formal di lingkungan pesantren pada dasarnya lahir dari tuntutan masyarakat dan wali murid yang menghendaki tersedianya pendidikan umum dan pendidikan agama secara bersamaan dalam satu lembaga (Ni & Arafah, 2024).

Penelitian ini menggunakan Paradigma Sosiologi Terpadu yang dikemukakan oleh George Ritzer sebagai landasan analisis. Paradigma tersebut memandang realitas sosial sebagai hubungan yang saling berkaitan antara dimensi makro dan mikro, serta antara aspek objektif dan subjektif (George Ritzer, n.d.). Pada level makro-objektif, perhatian diarahkan pada struktur sosial, aturan, dan kebijakan kelembagaan yang mengatur sistem pendidikan. Sementara itu, level makro-subjektif berkaitan dengan nilai, norma, budaya, dan keyakinan kolektif yang berkembang dalam lingkungan pesantren. Adapun level mikro-objektif berfokus pada pola interaksi dan tindakan sosial warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan level mikro-subjektif menitikberatkan pada kesadaran, pengalaman, serta pemaknaan individu terhadap sistem pendidikan yang dijalani. Penggunaan teori ini dinilai relevan karena sistem pendidikan terintegrasi berbasis pesantren tidak hanya dibentuk oleh aturan formal, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya pesantren dan pengalaman sosial para siswa sebagai pelaku pendidikan (Kairin, 2025).

Secara empiris, penerapan Paradigma Sosiologi Terpadu dalam penelitian ini tidak berhenti pada tataran konseptual semata. Level makro-objektif yang dimaksud dalam kerangka teori tersebut secara konkret bertaut dengan kebijakan pendidikan nasional yang membingkai keberadaan sekolah formal berbasis pesantren, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Kedua regulasi tersebut menjadi struktur objektif yang secara langsung membentuk ruang gerak kebijakan di SMK Nurul Huda, sebagaimana akan tampak pada temuan penelitian bahwa sinkronisasi kurikulum, pembagian kewenangan kelembagaan, dan penyesuaian kalender akademik antara sekolah formal dan pesantren bukan semata inisiatif internal lembaga, melainkan juga merupakan implementasi dari kerangka hukum yang mengakui koeksistensi pendidikan formal dan pendidikan keagamaan berbasis masyarakat. Dengan demikian, dimensi makro dalam penelitian ini berfungsi sebagai jembatan antara konteks kebijakan pendidikan nasional yang bersifat luas dan realitas empiris yang ditemukan di lapangan.

Secara regulatif, hubungan antara sekolah formal dan pesantren di Indonesia ditopang oleh beberapa produk hukum yang saling melengkapi. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan keagamaan, termasuk pesantren, dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, maupun informal, sehingga membuka ruang bagi keberadaan sekolah formal di lingkungan

pesantren. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan keagamaan agar dapat berjalan berdampingan dengan satuan pendidikan formal tanpa menghilangkan kekhasannya. Secara lebih spesifik, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, khususnya Pasal 15 dan Pasal 17, menyebutkan bahwa pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulumnya masing-masing, serta dapat menyelenggarakan pendidikan formal dan/atau nonformal sesuai dengan kebutuhan lembaga. Dalam konteks SMK Nurul Huda, kedudukan sekolah formal tetap tunduk pada ketentuan kurikulum nasional yang ditetapkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sementara pendidikan kepesantrenan berjalan sebagai satuan yang kekhasannya diakui berdasarkan Undang-Undang Pesantren. Perpaduan dua kerangka regulasi inilah yang secara struktural melegitimasi model integrasi kelembagaan antara sekolah formal dan pesantren berbasis masyarakat, sekaligus menjadi payung hukum yang memungkinkan pesantren berperan dominan dalam menentukan arah kebijakan pendidikan di lingkungannya sendiri.

Secara faktual, implementasi pendidikan terintegrasi berbasis pesantren masih menghadapi berbagai persoalan, baik yang bersifat struktural maupun kultural (Ahmad Faqihuddin, 2026). Integrasi antara pendidikan formal dan pendidikan kepesantrenan sering kali memunculkan tantangan dalam sinkronisasi kurikulum, pengaturan waktu belajar, dan penyesuaian antara kebutuhan pendidikan modern dengan budaya tradisional pesantren (Mizaniyyah, 2025). Beban aktivitas yang padat juga menjadi persoalan tersendiri bagi siswa karena mereka harus menjalani kegiatan sekolah formal sekaligus aktivitas kepesantrenan dalam waktu yang bersamaan (Nurul, 2024). Di sisi lain, beberapa lembaga pendidikan masih menunjukkan pola integrasi yang bersifat administratif semata sehingga hubungan antara sekolah dan pesantren belum sepenuhnya menyentuh aspek budaya dan kesadaran sosial warga sekolah (Kusuma et al., 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa integrasi pendidikan tidak hanya berkaitan dengan penyatuan sistem belajar, tetapi juga menyangkut harmonisasi nilai, budaya, dan struktur sosial dalam lembaga pendidikan (Ni & Arafah, 2024).

Penelitian ini menjadi penting dilakukan mengingat meningkatnya minat masyarakat terhadap sekolah berbasis pesantren sebagai alternatif pendidikan yang mampu mengintegrasikan kemampuan akademik dengan pembentukan moral dan karakter religius (Farhanillah et al., 2025). Sekolah terintegrasi berbasis pesantren tidak hanya menjalankan fungsi pendidikan formal, tetapi juga berperan sebagai sarana pembentukan identitas sosial masyarakat santri yang religius, disiplin, dan adaptif terhadap perkembangan zaman (Ochocka, 2025). Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengkaji bagaimana pesantren membentuk kebijakan sekolah formal, bagaimana budaya pesantren memengaruhi sistem pendidikan, serta bagaimana siswa memaknai pengalaman mereka dalam menjalani sistem pendidikan terintegrasi tersebut. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara pesantren, masyarakat, dan sistem pendidikan formal dalam konteks pendidikan Islam kontemporer.

Kajian mengenai integrasi pendidikan pesantren dan sekolah formal sebenarnya telah banyak dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Arifin, Joanna Ochocka, dan Imam Tabroni pada tahun 2025 menunjukkan bahwa integrasi kurikulum pesantren dan sekolah formal dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan supervisi yang terstruktur (Ochocka, 2025). Penelitian lain yang dilakukan oleh Ira Kusumawati dan Nurfuadi pada tahun 2024 menjelaskan bahwa integrasi kurikulum nasional dan pesantren mampu memperkuat identitas keislaman sekaligus meningkatkan kualitas moral peserta didik (Kusumawati, 2024). Sementara itu, penelitian Hana Malihatul Azizah dan rekan-rekannya pada tahun 2023 menemukan bahwa model pesantren satu atap mampu menciptakan integrasi kurikulum yang baik meskipun masih menghadapi keterbatasan fasilitas pembelajaran (Azizah et al., 2023). Penelitian Ahmad Mahfudzi

Mafrudlo dan timnya pada tahun yang sama menyoroti pentingnya pola interaksi sosial antara guru dan santri dalam membentuk sistem pendidikan pesantren kontemporer (Mahfudzi et al., 2023). Selain itu, penelitian Hantika Aulia, Abu Anwar, dan Kuncoro Hadi pada tahun 2022 mengungkap bahwa integrasi Islam dan sains dalam pendidikan Islam dilakukan melalui kurikulum formal maupun hidden curriculum (Aulia, 2022).

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek manajemen kurikulum, efektivitas pembelajaran, dan implementasi administratif pendidikan terintegrasi. Kajian mengenai hubungan antara struktur kebijakan pendidikan, budaya pesantren, pola interaksi sosial, dan kesadaran subjektif siswa dalam satu kerangka sosiologis yang utuh masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian yang secara khusus menempatkan pesantren sebagai basis utama pembentukan kebijakan sekolah formal berbasis masyarakat juga belum banyak ditemukan. Dengan demikian, terdapat ruang kajian yang belum banyak disentuh, khususnya terkait analisis sistem pendidikan terintegrasi berbasis pesantren menggunakan Paradigma Sosiologi Terpadu George Ritzer melalui pendekatan empat kuadran sosial.

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Nurul Huda karena lembaga tersebut memiliki karakteristik yang khas sebagai sekolah formal yang berkembang di bawah kultur pesantren. Sekolah ini dipilih karena sistem pendidikan formal yang diterapkan tidak dapat dipisahkan dari pengaruh budaya dan kebijakan pesantren yang menjadi fondasi utama lembaga. Selain itu, keberadaan sekolah formal di lingkungan pesantren tersebut lahir dari kebutuhan masyarakat yang menginginkan integrasi pendidikan agama dan pendidikan kejuruan dalam satu sistem pendidikan. Kondisi tersebut menjadikan lokasi penelitian ini relevan untuk mengkaji hubungan antara pesantren, masyarakat, dan kebijakan sekolah terintegrasi secara lebih mendalam.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan Paradigma Sosiologi Terpadu George Ritzer untuk menganalisis hubungan antara pesantren dan kebijakan sekolah terintegrasi berbasis masyarakat secara menyeluruh. Penelitian ini tidak hanya membahas aspek administratif pendidikan terintegrasi, tetapi juga menghubungkan struktur kebijakan, budaya pesantren, praktik sosial, dan kesadaran siswa dalam satu kerangka analisis yang saling berkaitan. Selain itu, penelitian ini menempatkan pesantren sebagai pusat pembentukan kebijakan sekolah formal, bukan sekadar institusi pendamping dalam pendidikan agama. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam pengembangan kajian sosiologi pendidikan Islam, khususnya mengenai hubungan antara kultur pesantren dan sistem pendidikan formal modern. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian sosiologi pendidikan Islam, terutama dalam penggunaan Paradigma Sosiologi Terpadu untuk memahami dinamika pendidikan berbasis pesantren. Adapun secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengelola pesantren, sekolah formal, maupun pembuat kebijakan pendidikan dalam mengembangkan model pendidikan terintegrasi yang tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter sosial dan religius peserta didik. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pendidikan berbasis masyarakat yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial dan perkembangan pendidikan kontemporer. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan sekolah terintegrasi berbasis pesantren di SMK Nurul Huda dalam perspektif Paradigma Sosiologi Terpadu George Ritzer, serta mengkaji pengaruh budaya pesantren terhadap struktur kebijakan, pola interaksi sosial, dan kesadaran siswa dalam sistem pendidikan terintegrasi berbasis masyarakat.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian diarahkan untuk memahami fenomena kebijakan sekolah terintegrasi berbasis pesantren secara mendalam sesuai dengan kondisi sosial yang berlangsung di lapangan. Melalui pendekatan tersebut, peneliti dapat mengungkap

makna, pengalaman, dan dinamika sosial yang muncul dalam penyelenggaraan pendidikan terpadu antara pesantren dan sekolah formal. Adapun desain studi kasus digunakan karena penelitian difokuskan pada satu lembaga pendidikan, yaitu SMK Nurul Huda, yang memiliki karakteristik khas dalam mengintegrasikan sistem pendidikan formal dengan kultur kepesantrenan berbasis masyarakat. Fokus tersebut memungkinkan penelitian dilakukan secara lebih mendalam untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kebijakan pendidikan, budaya lembaga, serta praktik sosial yang berkembang di lingkungan sekolah dan pesantren.

Penentuan subjek penelitian dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan tingkat keterlibatan dan pemahaman informan terhadap sistem pendidikan terintegrasi yang diterapkan di lembaga tersebut. Informan penelitian terdiri atas kepala sekolah, pengasuh pesantren, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru, ustadz, serta siswa atau santri yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pendidikan terintegrasi di SMK Nurul Huda. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai implementasi kebijakan sekolah terintegrasi, budaya pesantren, dan pengalaman sosial peserta didik. Sementara itu, observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas pendidikan, pola interaksi sosial, dan kehidupan keseharian warga sekolah. Adapun dokumentasi digunakan sebagai data pendukung melalui pengumpulan arsip, tata tertib, struktur organisasi, jadwal kegiatan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama (human instrument) yang terlibat langsung dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data. Selain peneliti sebagai instrumen utama, digunakan pula instrumen pendukung berupa pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi untuk membantu proses pengumpulan data secara sistematis. Pedoman wawancara disusun berdasarkan fokus penelitian yang mengacu pada Paradigma Sosiologi Terpadu George Ritzer, terutama yang berkaitan dengan struktur kebijakan pendidikan, budaya pesantren, pola interaksi sosial, dan kesadaran subjektif siswa. Lembar observasi digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas sosial dan praktik pendidikan yang berlangsung di lingkungan sekolah dan pesantren selama proses penelitian berlangsung.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tiga tahapan, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak awal pengumpulan data hingga penelitian selesai dilaksanakan. Data yang telah diperoleh kemudian dikelompokkan berdasarkan empat kuadran dalam Paradigma Sosiologi Terpadu George Ritzer, yakni makro-objektif, makro-subjektif, mikro-objektif, dan mikro-subjektif. Pengelompokan tersebut bertujuan untuk memahami keterkaitan antara struktur kebijakan pendidikan, budaya pesantren, praktik sosial warga sekolah, dan pengalaman subjektif siswa dalam sistem pendidikan terintegrasi berbasis masyarakat. Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode melalui perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat keabsahan yang lebih kuat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Sekolah Terintegrasi Berbasis Pesantren di SMK Nurul Huda

Penyelenggaraan pendidikan di SMK Nurul Huda dilaksanakan melalui penggabungan antara sistem pendidikan formal dan pendidikan pesantren dalam satu pola kelembagaan yang terintegrasi. Kurikulum sekolah tetap mengikuti ketentuan Kemendikbudristek, terutama pada mata pelajaran umum dan kompetensi kejuruan, sedangkan pendidikan pesantren diarahkan pada pembelajaran diniyah, kajian kitab, pembinaan ibadah, serta pembentukan akhlak dan pembiasaan religius. Integrasi tersebut terlihat pada penyesuaian jadwal kegiatan antara sekolah dan pesantren sehingga siswa dapat mengikuti pembelajaran formal sekaligus aktivitas kepesantrenan tanpa terpisah secara kelembagaan. Sinkronisasi juga

tampak dalam pengaturan kalender akademik dan kebijakan libur pondok yang mengikuti jadwal sekolah formal sebagai bentuk penyatuan sistem administrasi pendidikan.

Struktur kelembagaan sekolah dibangun melalui kerja sama antara unsur sekolah formal dan pesantren. Pengelolaan pendidikan formal berada di bawah tanggung jawab kepala sekolah, sedangkan kehidupan kepesantrenan dan pendidikan diniyah dikelola oleh pengasuh pesantren. Pembagian tugas antara guru formal dan ustadz dilakukan berdasarkan bidang masing-masing, namun tetap berada dalam koordinasi yang saling berkaitan. Guru formal berfokus pada pembelajaran akademik dan kejuruan, sementara ustadz bertanggung jawab terhadap pendidikan keagamaan, pembinaan karakter, dan pengawasan disiplin santri. Hal ini dikonfirmasi oleh pihak manajemen kurikulum sekolah:

"Jadi begini, kalau untuk bentuk formalnya, integrasi kurikulum di SMK Nurul Huda ini dilaksanakan melalui penggabungan kurikulum nasional kejuruan dengan kurikulum kepesantrenan yang berada di bawah naungan PP. Nurul Huda Pajaran. Kurikulum formal kami tetap mengacu penuh pada standar Kemendikbudristek, terutama untuk mata pelajaran umum dan kompetensi kejuruan SMK. Sedangkan untuk kurikulum pesantren, fokusnya pada pendidikan diniyah, pembinaan akhlak, pembelajaran kitab, ubudiyah, serta pembiasaan religius." (Wawancara dengan Waka Kurikulum, 2026).

Sebagian tenaga pendidik berasal dari lingkungan pesantren dan mengajar pada dua sistem pendidikan sekaligus (mengajar di SMK dan guru diniyah), sehingga hubungan antara sekolah dan pesantren berlangsung secara lebih menyatu. Pengawasan siswa tidak hanya dilakukan pada jam sekolah, tetapi juga berlanjut dalam kehidupan asrama dan aktivitas pesantren sehari-hari.

Pengelolaan sarana pendidikan dilakukan secara terpadu sesuai kebutuhan sekolah formal dan pesantren. Ruang kelas, laboratorium, dan bengkel praktik digunakan untuk mendukung pembelajaran vokasional siswa, sedangkan asrama, masjid, dan ruang diniyah dimanfaatkan untuk kegiatan pembinaan karakter dan aktivitas keagamaan. Sistem pendanaan lembaga bersumber dari bantuan pemerintah, yayasan pesantren, kontribusi wali murid, dan partisipasi masyarakat sekitar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sekolah formal dan pesantren tidak berjalan secara terpisah, melainkan saling menopang dalam mendukung proses pendidikan siswa secara menyeluruh.

Jika ditinjau dari aspek regulasi, pola integrasi kurikulum dan kelembagaan yang diterapkan di SMK Nurul Huda sejalan dengan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang mengatur bahwa pesantren dapat menyelenggarakan pendidikan formal dengan kurikulum yang terdiri atas kurikulum pesantren dan kurikulum pendidikan umum. Kurikulum sekolah formal yang mengacu pada standar Kemendikbudristek menunjukkan kepatuhan lembaga terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sementara kurikulum diniyah dan pembinaan akhlak yang dikelola pesantren merupakan wujud pengakuan atas kekhasan pesantren sebagaimana dilindungi oleh Undang-Undang Pesantren. Sinkronisasi kalender akademik dan kebijakan libur pondok yang ditemukan dalam penelitian ini pada dasarnya merupakan bentuk konkret dari harmonisasi dua kerangka regulasi tersebut, yang memungkinkan sekolah formal dan pesantren berjalan dalam satu sistem tanpa saling meniadakan kewenangan masing-masing. Dengan kata lain, kebijakan integrasi yang tampak di lapangan bukan sekadar kesepakatan internal, melainkan juga cerminan dari struktur hukum yang secara sah mengakui koeksistensi dua sistem pendidikan tersebut.

Dominasi Budaya Pesantren dalam Sistem Pendidikan

Keberadaan sekolah formal di lingkungan pesantren lahir dari kebutuhan masyarakat yang menghendaki pendidikan umum dan pendidikan agama dapat diperoleh dalam satu lembaga pendidikan. Seperti dikemukakan oleh salah satu tokoh yayasan:

"Sebenarnya kalau mau jujur, fokus utama awal kami adalah mendirikan Pondok Pesantren. Kebetulan pengasuh, K.H Masykur Hafidz, adalah santri dari K.H Abdul Hamid Pasuruan. Beliau

sama sekali tidak memiliki riwayat pendidikan formal, hanya lulusan SD, jadi fokusnya murni ke pesantren. Namun, karena adanya tuntutan dan aspirasi yang besar dari masyarakat serta wali murid, maka berdirilah sekolah formal SMK Nurul Huda ini." (Wawancara dengan Tokoh Yayasan, 2026).

Walaupun sekolah formal terus berkembang, kultur pesantren tetap menjadi pusat utama dalam pembentukan kebijakan dan budaya pendidikan di lembaga tersebut. Dominasi budaya pesantren terlihat dari kuatnya pengaruh kegiatan kepesantrenan terhadap ritme pendidikan sekolah formal. Aktivitas pesantren yang padat sering kali menjadi dasar penyesuaian jadwal sekolah, termasuk ketika kegiatan besar keagamaan menyebabkan perubahan aktivitas pembelajaran formal.

Budaya pesantren tercermin dalam pola kehidupan sehari-hari siswa melalui tradisi penghormatan kepada guru dan kiai, penggunaan bahasa yang santun, serta pembiasaan ibadah berjamaah dan kegiatan pengajian rutin. Aktivitas siswa berlangsung dalam jadwal yang padat sejak pagi hingga malam hari sehingga membentuk pola hidup yang disiplin dan teratur. Kebiasaan tersebut membangun sikap mandiri, kepatuhan terhadap aturan, dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan siswa. Nilai-nilai religius juga menjadi bagian dari proses pembelajaran formal melalui penanaman etika kerja Islami, kedisiplinan, dan pembentukan akhlakul karimah dalam kegiatan belajar di kelas. Dengan demikian, budaya pesantren tidak hanya hadir pada aktivitas nonformal, tetapi turut membentuk pola komunikasi dan proses pendidikan formal di sekolah.

Harapan masyarakat terhadap lulusan sekolah terintegrasi berbasis pesantren tidak hanya berorientasi pada kemampuan akademik dan keterampilan kerja, tetapi juga pada pembentukan karakter religius dan moral peserta didik. Lulusan diharapkan mampu memiliki keseimbangan antara kompetensi vokasional dan nilai-nilai keislaman sehingga dapat beradaptasi dengan kebutuhan dunia kerja tanpa kehilangan identitas sebagai santri. Oleh sebab itu, identitas kepesantrenan terus dipertahankan melalui pembiasaan ibadah, kegiatan diniyah, penguatan tata krama, dan pembinaan akhlak dalam seluruh aktivitas pendidikan.

Dominasi budaya pesantren dalam membentuk kebijakan dan karakter siswa juga memiliki landasan regulatif. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren pada Bab II menegaskan asas kemandirian dan kekhasan sebagai salah satu prinsip penyelenggaraan pesantren, yang memberikan ruang otonomi bagi pesantren untuk menentukan pola pembinaan, kedisiplinan, dan penguatan nilai religius sesuai tradisi kelembagaannya masing-masing tanpa harus tunduk sepenuhnya pada standar sekolah formal semata. Ketentuan ini menjelaskan mengapa kultur pesantren dapat menjadi rujukan utama dalam pembentukan kebijakan dan budaya pendidikan di SMK Nurul Huda, sekalipun sekolah formal secara administratif berada dalam koridor Kemendikbudristek. Dengan kata lain, dominasi budaya pesantren yang ditemukan dalam penelitian ini bukan semata fenomena sosial-kultural, melainkan juga memiliki pijakan hukum yang mengakui dan memfasilitasi kekhasan pesantren sebagai bagian sah dari penyelenggaraan pendidikan nasional.

Dinamika Sosial dalam Kehidupan Pendidikan Terintegrasi

Pola hubungan sosial di lingkungan sekolah dan pesantren menunjukkan adanya kerja sama yang erat antara guru formal dan ustadz dalam membina perilaku dan kedisiplinan siswa. Pengawasan terhadap siswa dilakukan secara bersama melalui komunikasi informal maupun koordinasi dalam rapat tertentu ketika ditemukan pelanggaran disiplin atau penurunan prestasi belajar. Sistem tersebut memperlihatkan bahwa tanggung jawab pendidikan siswa tidak hanya berada pada sekolah formal, tetapi juga menjadi bagian dari pembinaan pesantren.

Kehidupan siswa memperlihatkan adanya pembagian peran antara aktivitas sekolah formal dan aktivitas kepesantrenan. Pada pagi hingga siang hari, siswa menjalani kegiatan sebagai pelajar SMK melalui pembelajaran umum dan praktik kejuruan di laboratorium

maupun bengkel praktik sesuai bidang masing-masing. Selanjutnya, pada sore hingga malam hari, khususnya bagi santri mukim, aktivitas beralih pada kegiatan kepesantrenan seperti salat berjamaah, mengaji Al-Qur'an, madrasah diniyah, pengajian kitab, dan pembinaan akhlak di asrama. Pergantian aktivitas tersebut menunjukkan adanya dualitas peran yang dijalani siswa sebagai peserta didik sekolah formal sekaligus santri pesantren. Hal ini dikemukakan oleh salah satu guru SMK Nurul Huda:

"Bayangkan, mereka harus belajar formal dari pagi sampai siang, lalu lanjut kegiatan pesantren sampai malam. Efeknya, waktu istirahat mereka terbatas, konsentrasi belajar kadang menurun, dan fisik mereka kelelahan. Malah sering ada santri mukim yang datang terlambat ke kelas di pagi hari dengan alasan kecapekan mengikuti jadwal pesantren malamnya."

Dengan demikian, pelaksanaan sistem pendidikan terintegrasi juga menghadapi berbagai kendala teknis, terutama berkaitan dengan padatnya aktivitas siswa. Jadwal kegiatan yang berlangsung sejak pagi hingga malam menyebabkan sebagian siswa mengalami kelelahan fisik, keterbatasan waktu istirahat, dan penurunan konsentrasi belajar. Kondisi tersebut terkadang memengaruhi kedisiplinan siswa, terutama bagi santri mukim yang mengalami keterlambatan akibat aktivitas pesantren yang cukup padat. Selain itu, kebutuhan pendidikan vokasional yang memerlukan fleksibilitas praktik sering kali harus disesuaikan dengan jadwal ibadah dan kegiatan rutin pesantren yang bersifat tetap. Oleh karena itu, pihak sekolah dan pesantren terus melakukan penyesuaian jadwal agar kedua sistem pendidikan dapat berjalan secara seimbang.

Dinamika sosial berupa padatnya aktivitas siswa dan terbatasnya waktu istirahat yang ditemukan dalam penelitian ini juga perlu dibaca dalam kerangka regulasi yang mengatur beban belajar dan pengasuhan santri. Ketentuan mengenai standar proses pendidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan yang diatur oleh Kemendikbudristek pada dasarnya menetapkan batas beban belajar formal, namun ketentuan tersebut belum secara eksplisit mengakomodasi tambahan aktivitas kepesantrenan yang berlangsung di luar jam sekolah. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren tidak mengatur secara rinci standar waktu istirahat maupun beban aktivitas santri yang menjalani pendidikan ganda, sehingga pengaturan jadwal antara sekolah dan pesantren di lapangan lebih banyak bergantung pada kebijakan internal lembaga daripada pedoman regulasi yang baku. Kondisi ini menunjukkan adanya celah regulasi antara kebijakan pendidikan formal dan kebijakan kepesantrenan dalam mengatur keseimbangan aktivitas siswa yang menjalani peran ganda sebagai pelajar dan santri, sehingga penyesuaian jadwal yang dilakukan pihak sekolah dan pesantren pada praktiknya menjadi mekanisme adaptif untuk mengisi kekosongan pengaturan tersebut.

Makna Pendidikan Terintegrasi Bagi Siswa

Sistem pendidikan terintegrasi dipahami siswa sebagai pengalaman pendidikan yang menuntut kesiapan fisik, mental, dan kemampuan beradaptasi terhadap dua sistem pendidikan sekaligus. Pada tahap awal, sebagian siswa mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan jadwal kegiatan yang padat, terutama dalam membagi waktu antara pembelajaran formal, kegiatan diniyah, dan waktu istirahat. Namun seiring berjalannya waktu, siswa mulai terbiasa dengan pola kehidupan sekolah dan pesantren sehingga terbentuk sikap disiplin, mandiri, dan kemampuan mengendalikan diri dalam kehidupan sehari-hari.

Keberadaan sistem pendidikan terpadu dipandang memberikan manfaat karena siswa memperoleh pendidikan umum, keterampilan kerja, dan pendidikan agama secara bersamaan dalam satu lingkungan pendidikan. Aktivitas siswa yang diatur melalui tata tertib sekolah dan pesantren juga membentuk pola hidup yang lebih terarah dibandingkan sekolah umum pada umumnya. Dalam aspek identitas diri, siswa memandang dirinya sebagai perpaduan antara santri dan pelajar kejuruan, meskipun identitas sebagai santri tetap menjadi bagian yang lebih dominan dalam pembentukan karakter mereka. Keinginan memperoleh ilmu umum, keterampilan kerja, dan pendidikan agama secara bersamaan menjadi faktor utama yang

mendorong siswa bertahan dalam sistem pendidikan tersebut. Selain itu, masyarakat dan orang tua meyakini bahwa pendidikan berbasis pesantren mampu membentuk lulusan yang tidak hanya siap memasuki dunia kerja, tetapi juga memiliki moralitas dan religiusitas yang kuat dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dari sisi regulasi, pemaknaan siswa terhadap identitas ganda sebagai santri sekaligus pelajar sekolah formal juga berkaitan dengan pengakuan negara terhadap kesetaraan lulusan pendidikan berbasis pesantren. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren mengatur bahwa lulusan satuan pendidikan pesantren berhak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik yang sejenis maupun tidak sejenis, sehingga status santri tidak menghambat akses siswa terhadap pendidikan formal maupun dunia kerja. Pengakuan regulatif inilah yang turut memberikan rasa aman dan kepastian bagi siswa SMK Nurul Huda untuk menjalani sistem pendidikan terintegrasi, karena identitas kepesantrenan yang mereka jalani tidak berada di luar pengakuan negara, melainkan menjadi bagian yang sah dari sistem pendidikan nasional. Dengan demikian, kesadaran subjektif siswa mengenai manfaat pendidikan terintegrasi tidak dapat dilepaskan dari jaminan regulasi yang menjembatani dua identitas pendidikan yang mereka jalani secara bersamaan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan terintegrasi berbasis pesantren di SMK Nurul Huda tidak hanya memperlihatkan integrasi antara sekolah formal dan pendidikan kepesantrenan pada aspek kurikulum dan kelembagaan, tetapi juga membentuk budaya pendidikan, pola interaksi sosial, dan kesadaran siswa secara menyeluruh. Integrasi tersebut terlihat melalui sinkronisasi kebijakan sekolah dan pesantren, pembagian peran antara guru formal dan ustadz, serta pengawasan siswa yang dilakukan secara bersama dalam kehidupan sekolah maupun asrama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pesantren memiliki posisi dominan dalam membentuk arah kebijakan dan identitas pendidikan formal berbasis masyarakat. Dalam perspektif Paradigma Sosiologi Terpadu George Ritzer, fenomena tersebut mencerminkan keterkaitan antara struktur sosial, budaya kelembagaan, praktik interaksi, dan kesadaran subjektif siswa dalam sistem pendidikan terintegrasi. Budaya pesantren yang diwujudkan melalui pembiasaan ibadah, kedisiplinan, penghormatan kepada guru, serta penguatan akhlakul karimah menjadi faktor utama yang membentuk karakter siswa sebagai santri sekaligus pelajar sekolah formal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nur Arifin dkk. dan Ahmad Mahfudzi Mafrudlo dkk (Mahfudzi et al., 2023; Ochocka, 2025). yang menegaskan bahwa integrasi pendidikan pesantren dan sekolah formal tidak hanya berlangsung pada aspek administratif, tetapi juga memengaruhi pembentukan budaya dan pola interaksi sosial dalam lembaga pendidikan. Selain itu, sistem pendidikan terintegrasi juga memunculkan dinamika sosial berupa padatnya aktivitas siswa yang menyebabkan kelelahan fisik dan keterbatasan waktu istirahat, meskipun pada saat yang sama mampu membentuk sikap disiplin, kemandirian, dan kontrol diri siswa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa pendidikan berbasis pesantren memiliki implikasi penting dalam pembentukan model pendidikan holistik yang tidak hanya berorientasi pada kemampuan akademik dan keterampilan kerja, tetapi juga pada penguatan moral, religiusitas, dan identitas sosial peserta didik.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pendidikan terintegrasi berbasis pesantren di SMK Nurul Huda melalui perspektif Paradigma Sosiologi Terpadu George Ritzer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi antara sekolah formal dan pesantren tidak hanya berlangsung pada aspek kurikulum dan kelembagaan, tetapi juga mencakup budaya pendidikan, pola interaksi sosial, serta pembentukan kesadaran siswa dalam kehidupan sehari-hari. Sistem pendidikan tersebut memperlihatkan adanya sinkronisasi kebijakan antara sekolah dan pesantren melalui penyatuan jadwal kegiatan, pengawasan siswa, pembagian peran tenaga pendidik, serta penguatan nilai religius dalam seluruh aktivitas

pendidikan. Dalam pelaksanaannya, pesantren memiliki posisi dominan dalam membentuk arah kebijakan dan identitas lembaga pendidikan formal berbasis masyarakat. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa budaya pesantren berperan penting dalam membentuk karakter disiplin, kemandirian, religiusitas, dan kontrol diri siswa melalui pembiasaan ibadah, penguatan tata krama, serta kehidupan asrama yang terstruktur. Meskipun sistem pendidikan terintegrasi memberikan tantangan berupa padatnya aktivitas siswa dan keterbatasan waktu istirahat, kondisi tersebut tetap dipandang mampu membentuk keseimbangan antara kemampuan akademik, keterampilan kerja, dan pembinaan moral peserta didik. Dengan demikian, pendidikan berbasis pesantren di SMK Nurul Huda menunjukkan bahwa model sekolah terintegrasi dapat menjadi alternatif pengembangan pendidikan Islam kontemporer yang berorientasi pada pembentukan pendidikan holistik berbasis karakter dan nilai-nilai religius.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Faqihuddin, D. (2026). *JKIP : Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Analysis Of Integrated Curriculum Implementation In Pesantren-Based Vocational High Schools In Riau Analisis Implementasi Kurikulum Terintegrasi Pada Sekolah Menengah Kejuruan*. 7(1), 233–241.
- Aulia, H. (2022). *Nilai Integrasi Islam dan Sains di Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia : Sekolah Islam Terpadu , Madrasah dan Pesantren*. 14(1), 110–124.
- Aviah Asmaul Husna, A. R. N. A. H. (2025). *INTEGRASI HIDDEN KURIKULUM DALAM NILAI KEDISIPLINAN SANTRI DI PONDOK PESANTREN PUTRI SALAFIYAH*.
- Azizah, H. M., Ma, A. R., Wijaya, B. A., Magister, P., Agama, P., Uin, I., Dadaprejo, J. R., & Batu, K. (2023). *Reintegrasi Lembaga Pendidikan Madrasah dan Pesantren (Studi Mengenai Pesantren Satu Atap)*. 15(2), 159–173. <https://doi.org/10.35457/konstruk.v15i2.2580>
- Farhanillah, N., Wanda, E., Inayah, R., Basir, A., Islam, U., Siber, N., Nurjati, S., Information, A., Character, I., & Insani, T. (2025). *INTEGRATING PESANTREN EDUCATIONAL VALUES IN FORMAL SCHOOLING : A CASE STUDY AT TAZKIA INSANI INTEGRATED ISLAMIC ELEMENTARY SCHOOL ,.* 18(1), 167–180.
- George Ritzer. (n.d.). *Sociological Theory*.
- Halil, H. (2003). *RELEVANSI SISTEM PENDIDIKAN PESANTREN DI ERA MODERNISASI*. 2.
- Imam Syafi'i, D. (2025). *INTEGRASI KURIKULUM PENDIDIKAN VOKASIONAL DAN PENDIDIKAN ISLAM DI MADRASAH ALIYAH BERBASIS PESANTREN*. 5(c).
- Kairin, dkk. (2025). *INTEGRASI PESANTREN DAN SEKOLAH NEGERI : ANALISIS REGULASI DAN KEBIJAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO . Abstrak Pendahuluan Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua dan paling berpengaruh di Indonesia (Azra , 2020). Secara historis , pes.* 5(2), 158–169.
- Kusuma, J. W., Gustiana, G., & Nurindah, S. (2024). *Analisis Keterpaduan Sistem Sekolah dan Pesantren serta Efektifitasnya dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. 8, 14784–14790.
- Kusumawati, I. (2024). *Integrasi Kurikulum Pesantren Dalam Kurikulum Nasional Pada Pondok Pesantren Modern*. 2(01), 1–7. <https://doi.org/10.58812/spp.v2i01>
- Mahfudzi, A., Aini, Z., & Wasath, G. (2023). *The Construction of Educational Interaction Models in Pesantren and Its Relevance to Contemporary Islamic Education*. 12(1), 101–114. <https://doi.org/10.22219/progresiva.v12i01.27896>
- Mizaniyyah, N. (2025). *MANAJEMEN WAKTU SANTRI DI PESANTREN : STUDI KOMPARATIF 10 PESANTREN DI INDONESIA* 5(2), 148–157.
- Ni, S., & Arafah, N. N. (2024). *Transformasi Sistem Pendidikan Formal Pesantren*. 6.

<https://doi.org/10.58577/dimar.v6i1.271>

Nurul, S. M. (2024). *PENGELOLAAN KURIKULUM TERINTEGRASI SEKOLAH BERBASIS PESANTREN DI SMK ROUDLOTUL MUBTADIIN BALEKAMBANG JEPARA*. 4(3), 136–147.

Ochocka, J. (2025). *ISLAMIC EDUCATION INNOVATION : Integration of Pesantren and Schools Curriculum*. 353–364. <https://doi.org/10.30868/ei.v14i02.8271>

Wardatul Hamrok, M. (2022). *DALAM MEMBENTUK KARAKTER RELIGIUS SISWA*. 9(1), 65–82.